



JURNAL ILMU MANAJEMEN

Published every June and December
e-ISSN: 2623-2081, p-ISSN: 2089-8177

Journal homepage: <https://ojs.um-palembang.ac.id/index.php/JIM>



Implementasi *Halal Supply Chain Management* (HSCM) pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Pangan: Studi Kualitatif

Sutono^a, Izzah Sarirotun Nijwah^{b*}, Zamrud Mirah Delima^c, Edi Wicaksono Abdurrosid^d

^{a,b,c,d} Universitas Muria Kudus, Indonesia

* Corresponding author e-mail: izzah.sarirotun@umk.ac.id

ARTICLE INFO

DOI: 10.32502/jim.v16i1.1635

Article history:

Received:
04 February 2026

Accepted:
20 May 2026

Available online:
15 December 2026

Keyword:

Halal Supply Chain
Management; Food MSMEs;
Halal Integrity; Halal
Certification; Qualitative Study

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of Halal Supply Chain Management (HSCM) among food micro, small, and medium enterprises (MSMEs). A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through semi-structured interviews with MSME actors and a key informant from the Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). The data were analyzed thematically to explore the understanding of halal, supply chain practices, and implementation challenges. The findings indicate that although MSMEs demonstrate a relatively high level of halal awareness, HSCM implementation remains partial and largely administrative. Upstream supply chain practices, particularly in raw material procurement, are predominantly informal and trust-based, increasing potential halal-related risks. The study identifies an implementation gap between halal awareness and operational practices, driven by limited managerial capacity and halal literacy. Furthermore, halal certification is often interpreted as symbolic compliance rather than a substantive supply chain management system. This study contributes to the HSCM literature by providing qualitative insights into MSME practices and by highlighting the interplay among values, perceptions, and managerial capability in shaping halal supply chain implementation.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Halal Supply Chain Management (HSCM) pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur terhadap pelaku UMKM dan informan kunci dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Analisis data dilakukan secara tematik untuk mengeksplorasi pemahaman halal, praktik rantai pasok, serta tantangan implementasi HSCM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki tingkat kesadaran halal yang relatif tinggi, namun implementasi HSCM masih bersifat parsial dan berorientasi pada pemenuhan administratif. Praktik rantai pasok hulu, khususnya dalam pengadaan bahan baku, masih didominasi oleh mekanisme informal dan berbasis kepercayaan, sehingga berpotensi menimbulkan risiko halal. Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan implementasi

(*implementation gap*) antara kesadaran halal dan praktik operasional yang dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas manajerial dan literasi halal. Selain itu, sertifikasi halal cenderung dimaknai sebagai bentuk kepatuhan simbolik (*symbolic compliance*) dibandingkan sebagai sistem pengelolaan rantai pasok yang substantif. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur HSCM dengan menghadirkan perspektif kualitatif dalam konteks UMKM serta menyoroti interaksi antara nilai, persepsi, dan kapasitas manajerial dalam implementasi rantai pasok halal. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkaya kajian HSCM berbasis UMKM melalui pendekatan kualitatif serta memberikan implikasi praktis bagi pelaku usaha dan regulator dalam penguatan implementasi rantai pasok halal yang berkelanjutan.

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Pendahuluan

Industri halal global mengalami pertumbuhan pesat seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap aspek kehalalan, keamanan pangan, dan etika produksi. Halal tidak lagi dipahami secara sempit sebagai kepatuhan terhadap syariat dalam bahan atau proses penyembelihan, tetapi telah berkembang menjadi konsep yang mencakup keseluruhan aktivitas rantai pasok, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penanganan produk akhir (Islam, 2025). Perkembangan ini melahirkan konsep *Halal Supply Chain Management* (HSCM) yang menekankan pentingnya menjaga integritas halal (*halal integrity*) di seluruh tahapan rantai pasok (M. I. Khan et al., 2022; S. Khan et al., 2023).

Dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penerapan HSCM menjadi tantangan yang semakin kompleks. UMKM memegang peran strategis dalam industri halal, khususnya sektor pangan, namun sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi manajerial, serta minimnya pemahaman terhadap konsep rantai pasok halal secara menyeluruh (Wahyuni et al., 2025). Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih memaknai halal sebatas kepemilikan sertifikat, tanpa mengintegrasikannya ke dalam sistem manajemen rantai pasok yang sistematis dan berkelanjutan (Javid & Amini, 2023).

Fenomena ini mencerminkan *phenomenon gap*, yaitu kesenjangan antara meningkatnya tuntutan konsumen dan regulator terhadap jaminan kehalalan produk dengan praktik aktual UMKM yang masih bersifat parsial dan administratif. Berbagai studi empiris di Indonesia menunjukkan bahwa UMKM cenderung menghadapi kendala dalam pengadaan bahan baku halal, ketergantungan pada pemasok eksternal, keterbatasan sistem pelacakan (*traceability*), serta risiko kontaminasi halal dalam proses produksi dan distribusi (Aziz et al., 2021). Kondisi ini berpotensi melemahkan integritas halal produk meskipun secara formal telah tersertifikasi.

Dari sisi manajerial, beberapa penelitian menegaskan bahwa penerapan HSCM pada UMKM sangat dipengaruhi oleh persepsi, kesadaran, dan komitmen pelaku usaha (Nasution & Sihotang, 2022). Studi di Malaysia dan Indonesia menunjukkan bahwa persepsi UMKM terhadap kompleksitas, biaya, dan manfaat HSCM menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi (Mohamed et al., 2020). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan UMKM sebagai objek pengukuran variabel, bukan sebagai subjek yang perspektif dan pengalamannya digali secara mendalam.

Selain itu, konteks kelembagaan menjadi faktor penting yang belum banyak dikaji. Di Indonesia, perubahan sistem sertifikasi halal

dari MUI ke BPJPH membawa implikasi signifikan bagi pelaku UMKM. Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memengaruhi pemahaman pelaku usaha terhadap tanggung jawab halal dalam rantai pasok (Zaharah et al., 2024). Studi-studi terdahulu lebih banyak menyoroti aspek kebijakan atau kesiapan sistem, sementara kajian yang mengungkap bagaimana UMKM memersepsikan dan menyesuaikan praktik HSCM pasca perubahan kelembagaan masih sangat terbatas (Kristiana et al., 2020).

Dari sisi akademik, terdapat *research gap* yang jelas dalam literatur HSCM. Mayoritas penelitian HSCM berfokus pada pengembangan kerangka konseptual, identifikasi faktor keberhasilan, serta pengujian hubungan HSCM dengan kinerja, keberlanjutan, atau daya saing perusahaan secara kuantitatif (Ab Talib et al., 2026; M. I. Khan et al., 2022). Sementara itu, pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan tantangan UMKM dalam mengelola rantai pasok halal masih relatif jarang, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Lebih lanjut, beberapa penelitian menekankan bahwa praktik halal dalam bisnis UMKM tidak dapat dilepaskan dari nilai religius, etika, dan tanggung jawab moral pelaku usaha. Nilai-nilai Islam berperan dalam membentuk sikap, pengambilan keputusan, serta cara pelaku usaha memaknai halal sebagai amanah, bukan sekadar kewajiban regulatif (Changalima, 2025; Toumi & Su, 2023). Namun, integrasi antara nilai-nilai tersebut dengan praktik HSCM dalam kajian empiris UMKM masih belum banyak dieksplorasi secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan *novelty* dalam tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini menggali persepsi UMKM terhadap implementasi *Halal Supply Chain Management* secara komprehensif, tidak terbatas pada aspek sertifikasi halal, tetapi mencakup praktik pengadaan, produksi, dan distribusi. Kedua, penelitian ini secara

kontekstual mengkaji HSCM dalam situasi perubahan kelembagaan sistem sertifikasi halal di Indonesia, yang masih jarang disentuh dalam literatur sebelumnya. Ketiga, melalui pendekatan kualitatif berbasis wawancara mendalam, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih kaya mengenai dinamika, tantangan, dan pemaknaan subjektif pelaku UMKM dalam menjaga integritas halal di sepanjang rantai pasok. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas kajian HSCM berbasis UMKM serta kontribusi praktis bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi penguatan rantai pasok halal yang lebih efektif, kontekstual, dan berkelanjutan.

Kajian Literatur

Halal Supply Chain Management (HSCM)

HSCM merupakan pendekatan manajerial yang bertujuan memastikan kehalalan produk tetap terjaga sepanjang rantai pasok, mulai dari sumber bahan baku hingga produk diterima oleh konsumen akhir. Konsep ini berkembang seiring kesadaran bahwa kehalalan produk tidak cukup dijamin hanya melalui sertifikasi akhir, tetapi harus dikelola secara sistematis dalam seluruh aktivitas rantai pasok (Nafi'ah et al., 2020). Changalima (2025) menegaskan bahwa HSCM menekankan prinsip *segregation*, *traceability*, dan *integrity*, guna mencegah kontaminasi halal, baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam konteks ini, HSCM mencakup pengelolaan pemasok, proses produksi, penyimpanan, transportasi, hingga distribusi produk halal. Pendekatan ini membedakan rantai pasok halal dari rantai pasok konvensional yang lebih menitikberatkan pada efisiensi biaya dan kecepatan distribusi semata.

Penelitian Primadasa et al. (2025) menunjukkan bahwa implementasi HSCM memerlukan kerangka sistematis yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, pemasok, lembaga

sertifikasi, dan regulator. Namun, implementasi kerangka tersebut sering kali menghadapi kendala pada tingkat UMKM, terutama akibat keterbatasan sumber daya, teknologi, dan pemahaman konseptual terhadap HSCM.

Halal Integrity dan Risiko dalam Rantai Pasok Halal

Halal integrity merujuk pada kondisi di mana status halal suatu produk tetap terjaga tanpa adanya pelanggaran syariah di sepanjang rantai pasok. (S. Khan et al., 2023) menekankan bahwa risiko halal dapat muncul pada berbagai titik kritis, seperti pengadaan bahan baku, penggunaan bahan tambahan, proses produksi bersama (*shared facilities*), serta distribusi dan penyimpanan produk.

Risiko dalam rantai pasok halal tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bersifat manajerial dan organisasional. Lestari et al. (2021) mengungkapkan bahwa lemahnya sistem pengawasan internal, rendahnya koordinasi dengan pemasok, serta absennya sistem pelacakan (*traceability*) meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran halal, khususnya pada usaha berskala kecil. Dalam konteks UMKM, risiko halal sering kali tidak disadari secara penuh oleh pelaku usaha. UMKM cenderung mengandalkan kepercayaan terhadap pemasok tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, sehingga integritas halal menjadi rentan meskipun produk telah tersertifikasi (Napitupulu et al., 2026; Nashirun, 2020). Hal ini menegaskan bahwa *halal integrity* bukan hanya persoalan kepatuhan formal, tetapi juga praktik manajerial yang berkelanjutan.

HSCM pada UMKM

UMKM memiliki peran strategis dalam pengembangan industri halal, namun sekaligus menghadapi tantangan terbesar dalam penerapan HSCM. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan modal, sumber daya manusia, dan akses teknologi menjadi penghambat utama implementasi HSCM pada UMKM (Primadasa et al., 2025).

Studi Kristiana et al. (2020) menemukan bahwa orientasi halal pada UMKM sangat dipengaruhi oleh persepsi pelaku usaha terhadap manfaat dan kompleksitas HSCM. Ketika HSCM dipersepsikan sebagai proses yang mahal dan rumit, UMKM cenderung mengadopsi pendekatan minimalis yang hanya berfokus pada pemenuhan sertifikasi. Sebaliknya, ketika HSCM dipahami sebagai strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing, tingkat adopsi menjadi lebih tinggi.

Penelitian lain menegaskan bahwa implementasi HSCM pada UMKM bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan kelembagaan, budaya, serta tingkat literasi halal pelaku usaha (Aziz et al., 2021). Oleh karena itu, pemahaman terhadap pengalaman dan persepsi UMKM menjadi penting dalam merancang model HSCM yang realistis dan aplikatif.

Persepsi Pelaku Usaha terhadap Implementasi HSCM

Persepsi pelaku usaha merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi HSCM. Menurut Ajzen (1991), persepsi dan sikap individu terhadap suatu praktik manajerial akan memengaruhi niat dan perilaku aktual dalam mengadopsi praktik tersebut. Dalam konteks HSCM, persepsi UMKM terhadap manfaat, risiko, dan kemudahan implementasi menjadi determinan utama penerapan di lapangan.

Nasution & Sihotang (2022) menemukan bahwa pelaku UMKM yang memahami HSCM sebagai bagian dari tanggung jawab religius dan etika bisnis menunjukkan komitmen yang lebih tinggi dalam menjaga integritas halal. Sebaliknya, UMKM yang memandang halal semata sebagai tuntutan regulasi cenderung menerapkan HSCM secara parsial dan reaktif.

Pendekatan kualitatif dinilai paling tepat untuk menggali persepsi ini secara mendalam, karena memungkinkan peneliti memahami

makna subjektif, pengalaman, serta dinamika pengambilan keputusan pelaku usaha (Changalima, 2025). Oleh sebab itu, studi kualitatif memberikan kontribusi penting dalam memperkaya literatur HSCM yang selama ini didominasi pendekatan kuantitatif.

Nilai Islam, Etika, dan Praktik Manajerial dalam HSCM

Dalam konteks bisnis halal, praktik manajerial tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Islam yang dianut oleh pelaku usaha. Toumi & Su (2023) menunjukkan bahwa nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan memengaruhi cara pelaku usaha mengelola bisnis, termasuk dalam menjaga kehalalan produk. Nilai-nilai tersebut mendorong pelaku UMKM untuk memaknai halal bukan sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai amanah moral dan religius. Konsep ini sejalan dengan pandangan Beekun (2004) yang menekankan bahwa etika bisnis Islam menempatkan kepatuhan syariah dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi praktik bisnis berkelanjutan. Dengan demikian, HSCM pada UMKM tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga bersifat normatif dan etis. Integrasi antara nilai Islam dan praktik rantai pasok halal menjadi elemen penting dalam menjaga kepercayaan konsumen serta keberlanjutan usaha halal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi, pengalaman, dan pemaknaan pelaku UMKM terhadap implementasi HSCM, yang tidak dapat diukur secara memadai melalui pendekatan kuantitatif. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali fenomena sosial dan manajerial secara kontekstual, holistik, dan naturalistik (Creswell, 2014). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana praktik HSCM diterapkan oleh UMKM

pangan, termasuk tantangan, pemahaman, dan strategi yang dilakukan pelaku usaha dalam menjaga integritas halal di sepanjang rantai pasok.

Penelitian ini dilaksanakan pada UMKM sektor pangan yang telah atau sedang berproses dalam sertifikasi halal. Pemilihan UMKM pangan didasarkan pada karakteristik produk yang memiliki titik kritis halal tinggi, terutama terkait bahan baku, proses produksi, dan distribusi. Subjek penelitian terdiri atas pelaku UMKM pangan (pemilik atau pengelola usaha) yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional dan pemangku kepentingan terkait (misalnya pihak pendamping atau regulator halal di tingkat lokal) untuk memperoleh perspektif pendukung dan triangulasi data. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*, dengan kriterianya yaitu: UMKM bergerak di bidang pangan, pelaku usaha memiliki pengetahuan langsung tentang proses produksi dan pengadaan bahan baku, serta bersedia memberikan informasi secara terbuka. Teknik *purposive sampling* dinilai tepat dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti memilih informan yang paling relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2015).

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur. Teknik ini dipilih karena memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menggali informasi secara mendalam, sekaligus menjaga fokus pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian (Creswell & Poth, 2018). Panduan wawancara disusun berdasarkan konsep HSCM, *halal integrity*, dan praktik rantai pasok halal, yang mencakup antara lain: pemahaman pelaku UMKM tentang halal dan HSCM, praktik pengadaan bahan baku dan hubungan dengan pemasok, proses produksi dan pengendalian titik kritis halal, penyimpanan dan distribusi produk, persepsi terhadap sertifikasi halal dan perubahan sistem kelembagaan. Wawancara dilakukan secara langsung dan dicatat dalam bentuk catatan lapangan serta rekaman suara,

dengan persetujuan informan. Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa dokumen terkait sertifikasi halal, pedoman halal, dan literatur ilmiah untuk memperkuat analisis dan konteks penelitian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif tematik dengan mengacu pada tahapan analisis yang dikemukakan oleh Miles et al. (2014), yang meliputi: reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, dan penyederhanaan data hasil wawancara; penyajian data, dengan mengelompokkan data ke dalam kategori dan tema yang relevan dengan implementasi HSCM; penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menginterpretasikan makna data dan mengaitkannya dengan konsep serta temuan penelitian sebelumnya. Proses analisis dilakukan secara iteratif, di mana peneliti secara terus-menerus membandingkan data lapangan dengan kerangka konseptual dan literatur untuk memastikan konsistensi dan kedalaman interpretasi.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi data. Triangulasi sumber dilakukan dengan

membandingkan informasi dari pelaku UMKM dan pemangku kepentingan terkait, sedangkan triangulasi data dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen dan literatur yang relevan. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking*, yaitu mengonfirmasi kembali ringkasan hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud informan (Lincoln & Guba, 1985).

Penelitian ini memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian kualitatif. Seluruh informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaan identitasnya. Partisipasi informan bersifat sukarela dan dapat dihentikan sewaktu-waktu tanpa konsekuensi apa pun.

Hasil Penelitian

Profil dan Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan pelaku UMKM sektor pangan yang telah memiliki atau sedang dalam proses sertifikasi halal. Responden dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan produksi dan pengambilan keputusan operasional.

Tabel 1.
Karakteristik Demografi Responden

Kode	Jenis Usaha	Lama Usaha	Skala Usaha	Status Sertifikasi Halal	Peran Responden
R1	Roti & Bakery	>10 tahun	Kecil	Bersertifikat	Pemilik
R2	Jenang	>15 tahun	Mikro	Bersertifikat	Pemilik
R3	Olahan Kue Kering	5–10 tahun	Kecil	Proses Sertifikasi	Pengelola
R4	Snack Tradisional	>10 tahun	Mikro	Bersertifikat	Pemilik
R5	Produk Olahan Tepung	5–10 tahun	Kecil	Bersertifikat	Pemilik

Sumber: Data primer diolah (2026)

Tabel 2.
Informan Kunci (Triangulasi Kebijakan)

Kode Institusi	Jabatan	Peran dalam Penelitian
K1 BPJPH Kabupaten	Pendamping Halal	Informan kebijakan & prosedur sertifikasi

Sumber: Data primer diolah (2026)

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden merupakan pemilik usaha dengan pengalaman usaha lebih dari lima tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa responden memiliki pemahaman praktis yang memadai terkait proses produksi, pengadaan bahan baku, dan sertifikasi halal.

Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan analisis tematik terhadap data wawancara, diperoleh enam tema utama yang merepresentasikan implementasi HSCM pada UMKM pangan.

Tabel 3.
Temuan Implementasi HSCM pada UMKM Pangan

Tema Utama	Subtema	Deskripsi Temuan	Sumber
Pemaknaan halal	Halal sebagai kewajiban religius	UMKM memandang halal sebagai amanah dan tanggung jawab moral	UMKM
	Halal sebagai instrumen kepercayaan pasar	Halal dipandang penting untuk menjaga kepercayaan konsumen	UMKM
Implementasi HSCM	Fokus pada sertifikasi	Implementasi halal masih berorientasi pada pemenuhan sertifikat	UMKM
	Kesenjangan pemahaman HSCM	UMKM belum memahami halal sebagai sistem rantai pasok terintegrasi	UMKM, BPJPH
Pengadaan bahan baku	Ketergantungan pada pemasok	UMKM mengandalkan klaim halal dari pemasok tanpa audit	UMKM
	Titik kritis bahan tambahan	Risiko halal muncul pada bahan tambahan pangan	BPJPH
Proses produksi	Pengendalian informal	Pengendalian halal dilakukan tanpa SOP tertulis	UMKM
Sertifikasi halal	Sertifikasi sebagai administrasi	Sertifikasi dipahami sebagai kewajiban administratif	UMKM
	Sertifikasi sebagai <i>entry point</i>	Sertifikasi seharusnya menjadi awal implementasi HSCM	BPJPH
Perubahan kelembagaan	Adaptasi UMKM	UMKM masih menyesuaikan diri dengan sistem sertifikasi baru	UMKM
	Peran pendampingan	Pendampingan dipandang krusial dalam masa transisi	BPJPH

Sumber: Data primer diolah (2026)

Pemaknaan Halal oleh Pelaku UMKM

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku UMKM tidak memaknai halal semata sebagai persyaratan administratif, melainkan sebagai kewajiban moral dan religius. Namun, pemaknaan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam sistem manajemen rantai pasok yang terstruktur.

“Kalau halal itu bagi saya ya kewajiban, bukan cuma buat jualan. Tapi memang jujur, praktiknya masih sebatas mengikuti aturan yang diminta waktu sertifikasi.” (R1)

Sebagian responden juga mengaitkan halal dengan kepercayaan konsumen, terutama di pasar lokal yang sensitif terhadap isu kehalalan produk.

“Sekarang konsumen sudah kritis. Kalau tidak halal, mereka langsung pindah. Jadi halal itu juga soal kepercayaan.” (R4)

Temuan ini menunjukkan bahwa pemaknaan halal bersifat normatif dan strategis, tetapi belum sepenuhnya operasional dalam konteks HSCM.

Praktik Pengadaan Bahan Baku dan Hubungan dengan Pemasok

Dalam praktik pengadaan bahan baku, sebagian besar UMKM mengandalkan kepercayaan terhadap pemasok, terutama untuk bahan tambahan pangan seperti perisa, pengembang, dan pewarna.

“Kami biasanya tanya ke supplier, ini sudah halal atau belum. Kalau ada sertifikatnya ya kami pakai.” (R2)

Namun, mekanisme verifikasi yang dilakukan masih terbatas dan bersifat informal. UMKM jarang melakukan audit pemasok atau pengecekan berkala terhadap status halal bahan baku.

“Tidak sampai audit, karena keterbatasan waktu dan biaya. Selama ini percaya saja sama supplier.” (R3)

Hal ini menunjukkan adanya kerentanan terhadap risiko halal, terutama ketika pemasok

berasal dari luar daerah atau menggunakan standar halal yang berbeda.

Pengendalian Proses Produksi dan Titik Kritis Halal

Pengendalian halal pada tahap produksi dilakukan secara sederhana, terutama melalui pemisahan alat dan bahan secara fisik. Namun, sebagian besar UMKM belum memiliki prosedur tertulis terkait pengendalian titik kritis halal.

“Alat produksi kami khusus untuk produk ini saja, tidak campur. Tapi memang belum ada SOP tertulis.” (R5)

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengendalian halal masih berbasis kebiasaan, bukan sistem manajemen formal. Meskipun demikian, pelaku usaha menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan mencegah kontaminasi.

Persepsi terhadap Sertifikasi Halal dan Implementasi HSCM

Sebagian besar responden memandang sertifikasi halal sebagai kebutuhan administratif yang wajib dipenuhi untuk keberlangsungan usaha. Namun, sertifikasi belum sepenuhnya dipahami sebagai bagian dari sistem HSCM yang berkelanjutan.

“Yang penting sertifikatnya ada dulu. Kalau soal rantai pasok halal secara menyeluruh, jujur belum sampai ke situ.” (R1)

Perubahan sistem sertifikasi halal juga menimbulkan kebingungan bagi sebagian UMKM, terutama terkait prosedur dan persyaratan yang dinilai semakin kompleks.

“Sekarang prosesnya beda, kami masih menyesuaikan. Kadang bingung juga harus mulai dari mana.” (R2)

Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan halal dan kesiapan implementasi HSCM pada UMKM.

Perspektif Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terhadap Implementasi HSCM pada UMKM

Perspektif dari BPJPH diperoleh melalui wawancara dengan informan kunci (K1) yang berperan sebagai pendamping halal di tingkat daerah. Wawancara ini bertujuan untuk memberikan triangulasi kebijakan serta memperkuat pemahaman terhadap implementasi HSCM pada UMKM pangan dari sudut pandang regulator.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa BPJPH memandang masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan UMKM terkait konsep halal yang bersifat menyeluruh. Menurut informan, sebagian besar UMKM masih memaknai halal sebatas pemenuhan persyaratan sertifikasi, belum sebagai sistem pengendalian proses dan rantai pasok secara terintegrasi.

“Secara umum UMKM masih fokus ke sertifikatnya. Padahal yang lebih penting itu bagaimana prosesnya dijaga dari awal sampai akhir.” (K1)

BPJPH menilai bahwa kondisi tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya komitmen UMKM, melainkan oleh keterbatasan literasi dan kapasitas manajerial. Banyak pelaku UMKM belum memahami titik kritis halal dalam rantai pasok, khususnya pada tahap pengadaan bahan baku dan penggunaan bahan tambahan pangan.

“UMKM sering tidak sadar bahwa bahan tambahan atau supplier itu bagian dari rantai pasok halal. Mereka pikir asal produk akhir halal, itu sudah cukup.” (K1)

Selain itu, BPJPH mengakui bahwa perubahan sistem sertifikasi halal membawa tantangan tersendiri bagi UMKM. Peralihan prosedur dan mekanisme dinilai membutuhkan proses adaptasi, baik dari sisi pelaku usaha maupun pendamping halal. Dalam praktiknya, perubahan ini kerap menimbulkan kebingungan di tingkat operasional UMKM.

“Perubahan sistem ini memang perlu waktu. UMKM banyak yang masih belajar, sehingga pendampingan menjadi sangat penting.” (K1)

Dari sudut pandang BPJPH, implementasi HSCM pada UMKM seharusnya diposisikan sebagai proses pembelajaran berkelanjutan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif. Oleh karena itu, pendekatan pendampingan lebih diutamakan dibandingkan dengan pendekatan pengawasan yang bersifat represif.

“Kami tidak hanya mengejar kepatuhan dokumen, tapi bagaimana UMKM bisa memahami dan menerapkan prinsip halal secara konsisten.” (K1)

Secara keseluruhan, perspektif BPJPH menguatkan temuan dari pelaku UMKM bahwa implementasi HSCM masih bersifat parsial dan belum terstruktur. Namun demikian, BPJPH menekankan bahwa kondisi tersebut merupakan bagian dari proses transisi menuju sistem halal yang lebih komprehensif, di mana kolaborasi antara regulator, pendamping, dan pelaku UMKM menjadi kunci utama keberhasilan implementasi HSCM.

Pembahasan

Pembahasan ini tidak hanya menginterpretasikan temuan penelitian, tetapi juga menempatkannya dalam konteks literatur *Halal Supply Chain Management* (HSCM) serta dinamika kelembagaan sistem halal di Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi HSCM pada UMKM pangan masih bersifat parsial, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara kesadaran halal dan kapabilitas implementasi pada level operasional.

Pemaknaan Halal dan Kesenjangan Implementasi HSCM

Temuan penelitian mengungkap bahwa pelaku UMKM memaknai halal sebagai kewajiban religius sekaligus strategi untuk membangun kepercayaan konsumen. Namun, pemaknaan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke

dalam praktik manajerial yang sistematis dalam rantai pasok. Hal ini menunjukkan adanya *decoupling* antara nilai (*value*) dan praktik (*practice*) dalam implementasi HSCM.

Secara teoretis, temuan ini memperluas pandangan Chagalima (2025) yang menempatkan halal sebagai sistem yang terintegrasi dalam rantai pasok. Penelitian ini menunjukkan bahwa pada konteks UMKM, integrasi tersebut tidak terjadi secara otomatis meskipun kesadaran nilai halal sudah tinggi. Dengan demikian, kesadaran religius tidak serta-merta menghasilkan kapabilitas operasional, terutama ketika tidak didukung oleh literasi manajerial dan sistem yang memadai.

Temuan ini juga memperkuat sekaligus memperdalam hasil penelitian Primadasa et al. (2025), dengan menunjukkan bahwa reduksi halal menjadi sekadar kepatuhan administratif bukan hanya persoalan persepsi, tetapi juga keterbatasan dalam menerjemahkan nilai ke dalam praktik operasional. Dengan kata lain, penelitian ini mengidentifikasi adanya *implementation gap* berbasis kapabilitas, bukan sekadar *gap* persepsi.

Risiko Halal dan Kelemahan Pengelolaan Rantai Pasok Hulu

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah lemahnya pengelolaan rantai pasok hulu, khususnya dalam pengadaan bahan baku. Ketergantungan UMKM pada kepercayaan terhadap pemasok tanpa mekanisme verifikasi formal menunjukkan bahwa praktik HSCM belum mencakup prinsip *traceability* dan *transparency* secara memadai.

Temuan ini sejalan dengan S. Khan et al. (2023) yang menekankan bahwa titik kritis risiko halal berada pada tahap pengadaan bahan baku dan penggunaan bahan tambahan pangan (Mohamed et al., 2020). Namun, penelitian ini memberikan kontribusi lebih lanjut dengan menunjukkan bahwa risiko

tersebut tidak hanya disebabkan oleh kompleksitas teknis, tetapi juga oleh keterbatasan sistem manajerial dan *resource constraints* pada UMKM.

Lebih jauh, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik berbasis kepercayaan (*trust-based system*) yang lazim pada UMKM dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kepercayaan mempermudah hubungan bisnis; namun di sisi lain, tanpa didukung mekanisme kontrol, hal tersebut justru meningkatkan kerentanan terhadap pelanggaran halal. Dengan demikian, penelitian ini mengidentifikasi adanya *trade-off* antara efisiensi relasional dan kontrol halal dalam konteks UMKM.

Sertifikasi Halal sebagai Simbol Kepatuhan vs Sistem Manajerial

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal masih dipersepsikan sebagai tujuan akhir, bukan sebagai bagian dari sistem manajemen rantai pasok. Hal ini mengindikasikan adanya *symbolic adoption*, di mana sertifikasi lebih berfungsi sebagai legitimasi eksternal dibandingkan sebagai instrumen pengendalian internal.

Temuan ini memperluas studi Wahyuni et al. (2025) dengan menunjukkan bahwa persepsi terhadap kompleksitas HSCM tidak hanya memengaruhi adopsi, tetapi juga memengaruhi kedalaman implementasi. Dalam konteks ini, UMKM cenderung mengadopsi HSCM pada level minimum (*compliance level*), tanpa mengintegrasikannya ke dalam sistem operasional.

Perspektif BPJPH dalam penelitian ini memperkuat interpretasi tersebut dengan menegaskan bahwa sertifikasi halal seharusnya diposisikan sebagai *entry point* menuju implementasi HSCM yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti adanya *misalignment* antara tujuan kebijakan dan praktik di lapangan, yang

berimplikasi pada efektivitas sistem halal secara keseluruhan.

Perubahan Kelembagaan dan Proses Adaptasi UMKM

Perubahan sistem sertifikasi halal di Indonesia menjadi faktor kontekstual penting yang memengaruhi implementasi HSCM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini menimbulkan kebingungan dan meningkatkan beban adaptasi bagi UMKM, terutama dalam memahami prosedur dan tanggung jawab baru.

Hal ini sejalan dengan perspektif *institutional theory* yang menyatakan bahwa perubahan kelembagaan dapat menciptakan tekanan adaptif bagi organisasi (Ab Talib et al., 2026). Namun, penelitian ini memberikan kontribusi kontekstual dengan menunjukkan bahwa pada UMKM, proses adaptasi tidak hanya dipengaruhi oleh tekanan regulatif, tetapi juga oleh keterbatasan kapasitas internal.

Dalam konteks ini, peran BPJPH sebagai pendamping menjadi sangat krusial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pendampingan yang bersifat edukatif lebih efektif dalam mendorong implementasi HSCM dibandingkan dengan pendekatan pengawasan semata. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi HSCM pada UMKM memerlukan pendekatan berbasis *capacity building*, bukan sekadar *compliance enforcement*.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan Implikasi

Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi HSCM pada UMKM pangan melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM telah memiliki kesadaran halal yang relatif tinggi, baik sebagai kewajiban religius maupun sebagai strategi untuk menjaga kepercayaan konsumen. Namun demikian, kesadaran tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi HSCM yang terstruktur dan terintegrasi di sepanjang rantai pasok.

Implementasi halal masih didominasi oleh pemenuhan sertifikasi sebagai kewajiban administratif, sementara pengelolaan rantai pasok hulu, khususnya pengadaan bahan baku dan hubungan dengan pemasok, masih dilakukan secara informal dan berbasis kepercayaan.

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa terdapat kesenjangan implementasi (*implementation gap*) antara pemahaman nilai halal dan praktik operasional, yang dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas manajerial dan literasi halal pelaku UMKM. Selain itu, ditemukan adanya kecenderungan kepatuhan simbolik (*symbolic compliance*), di mana sertifikasi halal lebih dimaknai sebagai bentuk legitimasi administratif dibandingkan sebagai sistem pengendalian rantai pasok yang substantif. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi HSCM pada UMKM berada pada tahap transisi dari sekadar pemenuhan kepatuhan menuju penerapan yang lebih terintegrasi.

Perspektif BPJPH sebagai informan kunci memperkuat temuan tersebut dengan menegaskan bahwa tantangan utama bukan terletak pada rendahnya komitmen pelaku usaha, melainkan pada keterbatasan pemahaman konseptual serta kapasitas dalam mengelola rantai pasok halal secara menyeluruh. Oleh karena itu, implementasi HSCM pada UMKM tidak hanya memerlukan regulasi, tetapi juga pendekatan berbasis penguatan kapasitas (*capacity building*) dan pendampingan yang berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa implementasi HSCM pada UMKM tidak bersifat linier, tetapi dipengaruhi oleh interaksi antara nilai religius, persepsi pelaku usaha, dan kapasitas manajerial. Penelitian ini juga memperkenalkan pemahaman bahwa praktik HSCM pada UMKM berada pada spektrum antara kepatuhan simbolik dan implementasi substantif, yang memperkaya literatur HSCM khususnya dalam konteks usaha skala kecil di negara berkembang.

Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya bagi UMKM untuk mulai menginternalisasi HSCM sebagai bagian dari sistem manajemen usaha, bukan sekadar kewajiban administratif. Bagi regulator, khususnya BPJPH, diperlukan strategi pendampingan yang lebih edukatif dan kontekstual guna meningkatkan literasi halal serta kemampuan implementasi HSCM pada UMKM.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diajukan. Pertama, bagi pelaku UMKM disarankan untuk mulai mengembangkan pengelolaan rantai pasok halal secara bertahap, seperti melakukan pencatatan pemasok, memastikan status halal bahan baku, serta memahami titik kritis halal dalam proses produksi. Langkah sederhana ini dapat menjadi fondasi menuju implementasi HSCM yang lebih sistematis.

Kedua, bagi BPJPH dan Pendamping Halal diperlukan penguatan program pendampingan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan dokumen sertifikasi, tetapi juga pada peningkatan pemahaman dan kapasitas UMKM dalam mengelola rantai pasok halal secara menyeluruh.

Ketiga, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model empiris terkait implementasi HSCM pada UMKM dengan mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, serta melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam rantai pasok halal.

Daftar Pustaka

Ab Talib, M. S., Zulfakar, M. H., & Kurniawati, D. A. (2026). Sustainable halal supply chain management: a multi-theory perspective. *Journal of Islamic Marketing*, 17(4), 1547–1584. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2024-0157>

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Aziz, F., Setyorini, R., & Hasanah, Y. N. (2021). Analisis Halal Supply Chain pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Makanan di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 293. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1936>
- Beekun, R. I. (2004). *Islamic business ethics*. Goodword Books Pvt.
- Changalima, I. A. (2025). Halal supply chain management: A bibliometric analysis of the 100 most-cited publications from Scopus-indexed journals. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101248. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2024.101248>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th ed). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N.. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among Five Approaches* (4th Edition). SAGE Publications, Inc.
- Islam, M. M. (2025). Halal supply chain management readiness and halal cosmetics in Bangladesh. *Journal of Islamic Marketing*, 16(8), 2148–2186. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2022-0130>
- Javid, N. J., & Amini, M. (2023). Evaluating the effect of supply chain management practice on the implementation of halal agroindustry and competitive advantage for small and medium enterprises. *International Journal of Computer Science and Information Technology*, 15(6). <https://ssrn.com/abstract=4348136>
- Khan, M. I., Haleem, A., & Khan, S. (2022). Examining the link between Halal supply chain management and sustainability. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 71(7), 2793–

2819. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-07-2019-0354>
- Khan, S., Haleem, A., & Khan, M. I. (2023). Risk assessment model for halal supply chain using an integrated approach of IFN and D number. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 41(3), 338–358. <https://doi.org/10.1108/AGJSR-09-2022-0160>
- Kristiana, B. V., Indrasari, A., & Giyanti, I. (2020). Halal Supply Chain Management dalam Optimalisasi Penerapan Sertifikasi Halal UMKM. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 19(2). <https://doi.org/10.20961/performa.19.2.46379>
- Lestari, F., Nurainun, T., Kurniawati, Y., & Adzkia, M. D. (2021, October 20). Barriers and Drivers for Halal Supply Chain on Small-Medium Enterprises in Indonesia. *Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists*.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications, Inc.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications Inc.
- Mohamed, Y. H., Abdul Rahim, A. R., & Ma'aram, A. (2020). The effect of halal supply chain management on halal integrity assurance for the food industry in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 12(9), 1734–1750. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2018-0240>
- Nafi'ah, U., Sulhaini, & Mulyono, L. E. H. (2020). Analysis of Halal Supply Chain Management and Internal Halal Traceability System on the Halal Integrity of Tourism in Support of UMKM Products in Lombok. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(9), 331–337. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v7i9.1871>
- Napitupulu, R. M., Sukmana, R., Sukmaningrum, P. S., & Khaliq, R. (2026). A New Framework of Islamic Entrepreneurship: Fostering Inclusivity, Sustainability—Policy Implications. *Sage Open*, 16(1). <https://doi.org/10.1177/21582440261417027>
- Nashirun. (2020). Makanan Halal dan Haram dalam Perspektif Al Qur'an. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal Dan Pariwisata Syariah*, 3.
- Nasution, A. S., & Sihotang, M. K. (2022). Analisis Pada UMKM Medan Marelan dalam Ekosistem Halal Value Chain. *Journal of Sharia Economics*, 3(2), 171–183. <https://doi.org/10.22373/jose.v3i2.2033>
- Patton, M. Quinn. (2015). *Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice*. SAGE Publications, Inc.
- Primadasa, R., Kusriani, E., Mansur, A., & Masudin, I. (2025). Integrating DEMATEL-ISM-MICMAC: an interconnected model of halal-sustainable supply chain management (HSSCM) indicators for SMEs. *Journal of Islamic Marketing*, 16(8), 2244–2275. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2024-0303>
- Toumi, S., & Su, Z. (2023). Islamic values and human resources management: A qualitative study of grocery stores in the Quebec province. *International Journal of Cross-Cultural Management*, 23(1), 79–112. <https://doi.org/10.1177/14705958221136691>
- Wahyuni, H. C., Vanany, I., Gunawan, I., & Mulyono, J. (2025). Improving halalness and food safety management systems in the Indonesian broiler supply chain: an interpretive structural modeling and Bayesian network approach. *Journal of Islamic Marketing*, 16(4), 1145–1173.

Sutono, Nijwah, Delima, & Abdurrosid

Implementasi *Halal Supply Chain Management* (HSCM) pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Pangan: Studi Kualitatif

<https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2023-0057>

Zaharah, R., Azhar, N. A. A. bt N., Faizal, L., Fauzi, Moh. Y., & Santoso, R. (2024). Halal Industry: A Comparative Analysis of Halal Certification Mechanisms in Indonesia and Malaysia from the

Perspective of Sharia Economic Law. *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 16, 149–160.